

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja pemerintah saat ini banyak mendapat sorotan publik terkait manfaat yang masyarakat dapatkan dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Suatu kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok memiliki kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan (Mahsun, 2006). Pemerintah memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat (Sampow et al., 2022). Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara pemerintah. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan pada awal periode (Mahsun, 2006).

Pemerintah daerah dengan hak otonomi memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Pada pengelolaan keuangan, Provinsi Bali menunjukkan adanya variasi pada efektivitas pengelolaan anggaran dan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi meski pendapatan daerah mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan tantangan pemerintah untuk merealisasikan anggaran dan melaksanakan program sesuai dengan rancangan yang telah disusun (Silvani, 2025). Provinsi Bali memiliki realisasi anggaran yang cukup besar, namun masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi target yang ditentukan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah wajib melaksanakan aspek-aspek fungsional secara efisien dan efektif untuk mewujudkan akuntabilitas dan *good governance* (Mahsun, 2006).

Konsep *value for money* merupakan salah satu konsep pengukuran kinerja yang sesuai untuk diterapkan pada organisasi sektor publik. *Value for money* dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance* (Tameon et al., 2023). Konsep *value for money* pada pengukuran kinerja organisasi sektor publik harus dioperasionalkan pada

pengelolaan keuangan dan anggaran daerah dengan mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas (Dinanty et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Halim & Kusufi, 2012a).

Pengukuran kinerja sektor publik tidak hanya menggunakan indikator finansial, tetapi juga menggunakan indikator nonfinansial. (Mahmudi, 2015). *Value for money* merupakan pengukuran kinerja sektor publik yang difokuskan untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *input*, *output*, dan *outcome* yang nantinya digunakan untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2015). Kinerja pemerintah dapat dikatakan telah berhasil mencapai *value for money* ketika pemerintah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* semaksimal mungkin dalam merealisasikan tujuan pemerintah (Novitasari & Ardini, 2021). *Value for money* bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik, menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan, meningkatkan mutu pelayanan publik, mengurangi biaya pelayanan publik sebagai bentuk efisiensi dalam penggunaan *input*, mengutamakan distribusi belanja untuk kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai landasan pelaksanaan tanggung jawab publik (Alexandre et al., 2023).

Pada tahun 2020, perekonomian Provinsi Bali mengalami perubahan signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Hal ini berdampak pada seluruh aspek perekonomian Provinsi Bali, salah satunya adalah sektor pariwisata sebagai kontributor utama perekonomian Provinsi Bali. Keadaan ini menyebabkan perubahan prioritas anggaran, penyesuaian program pembangunan serta mengharuskan pemerintah untuk mengelola sumber daya dengan keterbatasan keadaan secara lebih efisien dan efektif. Tak hanya itu, tahun 2021-2023 menjadi tantangan pemerintah Provinsi Bali untuk memulihkan perekonomian dan meningkatkan kinerja pembangunan daerah ketika masa pandemi dan setelahnya. Data yang didapatkan dari Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Provinsi Bali

menunjukkan bahwa, presentase realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2023. Pada tahun 2020, presentase realisasi anggaran menyentuh angka 93,85%. Kemudian, terjadi peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022 yang menunjukkan angka 98,79% dan 105,17%. Namun, pada tahun 2023 realisasi anggaran mengalami penurunan hingga 93,45%.

Data yang didapatkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Bali, menunjukkan bahwa realisasi penurunan tingkat inflasi pada Provinsi Bali masih jauh dari target. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali memiliki presentase realisasi tingkat inflasi yang cukup tinggi dari target, yaitu 5.39 dari target 3.00. Namun pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali kembali mengalami penurunan tingkat inflasi sebesar 1.68 dari target sebesar 3.00. Pada indikator pemerataan Ekonomis di Provinsi Bali mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi pemerataan Ekonomis Provinsi Bali menyentuh angka -9.31 dari target 6.30. Namun, hal tersebut berhasil ditingkatkan pada tahun berikutnya meski masih belum memenuhi target yaitu sebesar 4.52. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 3.05 dari target 3.10. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali berhasil memenuhi target pemerataan Ekonomis sebesar 5.66 dari 5.00.

Penjelasan diatas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kinerja Pemerintah Provinsi Bali yang masih belum memenuhi target. Namun, presentase realisasi menunjukkan angka yang cukup besar dari realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dinilai dari presentase realisasi anggaran, melainkan juga didukung oleh kualitas penggunaan anggaran dalam menghasilkan *outcome* dan *output*. Penelitian terkait analisis kinerja pemerintah berdasarkan konsep *value for money* sudah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, namun sebagian peneliti berfokus pada instansi tertentu. Secara khusus, penelitian ini meneliti kinerja pemerintah Provinsi Bali yang mengalami dinamika ekonomi dan kinerja pada tahun 2020-2023 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2020-2023.

Menurut Mahmudi (2015), fokus terpenting manajemen sektor publik adalah pencapaian efektivitas. Untuk mencapai efektivitas, organisasi harus efisien. Sebaliknya, organisasi yang efisien belum tentu efektif. Maka dari itu, yang perlu dilakukan organisasi tidak hanya menerapkan efisiensi terhadap biaya akan tetapi mencapai efektivitas biaya, yaitu dengan mengupayakan setiap biaya yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran terkait kesesuaian pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bali dengan konsep *value for money*. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan *value for money*. Dari penjabaran diatas, apakah kinerja Pemerintah Provinsi Bali sudah dapat dikatakan ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan konsep *value for money* untuk mengkaji lebih dalam terkait aspek-aspek kinerja yang masih memerlukan perbaikan dalam melaksanakan program pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKPP) Bali, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020-2023 Berdasarkan Konsep *Value For Money***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020-2023 berdasarkan konsep *value for money*?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020-2023 berdasarkan konsep *value for money*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan terutama dalam mengukur kinerja pemerintah, serta meningkatkan kemampuan menginterpretasikan laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi atau masukan dalam penyusunan APBD Pemerintah Provinsi Bali di tahun anggaran berikutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis atau pengembangan lebih lanjut.